

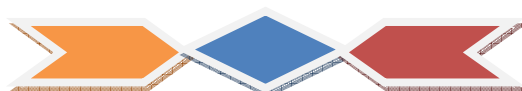


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

KEDARURATAN DAN KESELAMATAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI



TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kami karunia berupa kesehatan, sehingga kami dapat menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedaruratan dan Keselamatan Gedung Pemerintah Daerah Kota Cimahi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedaruratan dan Keselamatan Gedung Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Tujuan SOP Kedaruratan dan Keselamatan Gedung Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan di Pemerintah Kota Cimahi untuk mewujudkan *good governance*. SOP Kedaruratan dan Keselamatan Gedung Pemerintah Kota Cimahi tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP Kedaruratan dan Keselamatan Gedung Pemerintah Kota Cimahi selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. SOP Kedaruratan dan Keselamatan Gedung Pemerintah Kota Cimahi ini disusun sebagai upaya mitigasi bencana serta diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif dan efisien dalam kondisi darurat bencana.

Sudah barang tentu dalam penyusunan SOP ini jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan dan wawasan, karenanya berharap adanya saran maupun kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Cimahi, Maret 2019

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NANANG, M.Pd

Pembina

NIP. 19640105 198410 1 006

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Potensi Bencana Kota Cimahi.....	4
1.3.	Sasaran	8
1.4.	Dasar Hukum.....	9
BAB II	KAJIAN RISIKO.... ..	11
2.1.	Kajian Risiko.....	11
BAB III	KEUDUDUKAN SOP DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	15
3.1.	Kedudukan Standar Operasional Prosedur (SOP)	15
3.2.	Manajemen Penanggulangan Bencana.....	17
BAB IV	HASIL KAJIAN.....	20
4.1.	Desk Studi.....	20
4.2.	Survey Lapangan.....	21
4.2.1.	Kondisi Eksisting Peralatan dan Rambu Kedaruratan.....	22
4.2.2.	Populasi.....	23
4.2.3.	Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul.....	24
BAB V	STRUKTUR KOMANDO TINDAK KEDARURATAN DAN ALUR UMUM SOP	26
5.1.	Struktur Komando.....	26
5.2.	Alur Umum SOP.....	27
BAB V	PENUTUP.....	31

LAMPIRAN

1. Matrik SOP
2. Denah Gedung
3. Rekap Populasi dan Rambu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penanggulangan Bencana (*Disaster Management*) yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Penanggulangan bencana merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana salah satu bagian dari pembangunan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum kejadian, pada saat kejadian maupun sesudah kejadian bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah

dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh untuk mengurangi Indeks Risiko Bencana Indonesia.

Kota Cimahi memiliki ancaman bahaya besar bagi masyarakat di masa depan. Ancaman tersebut bernama Sesar Lembang, sebuah patahan di lempeng bumi tepat di bawah kawasan Lembang. Konsekuensi berada di atas sebuah Sesar adalah gempa bumi yang diakibatkan bergesernya Sesar tersebut. Sesar Lembang mempunyai kekuatan besar yang selama ini tersimpan di bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa menjadi gempa bumi dengan kekuatan yang cukup besar. Sesar adalah retakan pada lempeng kerak bumi yang bergeser. Di negara seperti Indonesia yang merupakan cincin api (*ring of fire*) tak asing dengan istilah sesar. Salah satu sesar yang cukup jadi perhatian adalah sesar Lembang. Sesar Lembang membentang sekitar 29 km dari mulai Gunung Manglayang-Tebing Keraton-Gunung Batu.

Dalam setiap keberadaan sesar, pergerakannya akan berpotensi menciptakan gempa bumi. Tak terkecuali dengan sesar Lembang yang diprediksi akan jadi ancaman bencana di masa depan. Pergeseran sesar yang membentang di utara kota Bandung yang jaraknya tidak terlalu jauh dari wilayah Kota Cimahi, ini bisa

menciptakan kerusakan yang fatal mengingat padatnya penduduk di kawasan cimahi dan sekitarnya.



Berdasarkan pendapat para ahli, sesar Lembang bisa memicu gempa dengan magnitudo 6,5-7 SR. Besarnya gempa ini kurang lebih sama dengan gempa Lombok. Jika itu terjadi, kawasan cimahi akan mengalami kerusakan yang cukup parah mengingat lokasinya yang tidak jauh di pusat gempa. Sampai saat ini tidak ada yang bisa memprediksi kapan dan di mana gempa bumi akan terjadi. Satu yang pasti, potensi itu besar kemungkinan terjadi.

Kota Cimahi sebagai kota otonom sejak 2003 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom, maka menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk melindungi warganya dan menjamin warganya untuk mendapatkan rasa aman termasuk

dari ancaman bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1.2. POTENSI BENCANA KOTA CIMAHI

Peta Potensi Rwan Bencana Kota Cimahi



Sumber data (BPBD Kota Cimahi)

Wilayah Kota Cimahi yang meliputi 3 (tiga) kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 kelurahan;
2. Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 kelurahan;
3. Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 kelurahan.

Dengan Jumlah Jiwa 601.099 orang pada 2017 (Cimahi Dalam Angka, 2018) tentu menjadikan tingkat kerentanan. Kota Cimahi memiliki risiko terhadap bencana yang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2013 memiliki skor 120 poin nasional. Secara umum, sejarah kebencanaan di Kota Cimahi relatif sedang dari berbagai kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Cimahi dalam kurun waktu 2011 – 2016, adapun jenis-jenis bencana yang terjadi di wilayah Kota Cimahi terdiri dari:

JENIS BENCANA	INTENSITAS RISIKO (SKALA 1-5)
Banjir	Sering terjadi (4) Terutama di daerah Cimahi Selatan
Longsor/Gerakan Tanah	Cukup sering (3) Terutama di daerah Cimahi Utara
Kebakaran	Sering terjadi (4) Terutama daerah Industri dan Pemukiman padat
Gempa	Cukup sering (3) Terutama di seluruh kawasan

Kegagalan Teknologi	Jarang (2) di area industri
---------------------	-----------------------------

Mengingat banyaknya kejadian bencana tersebut diperlukan suatu kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memerlukan suatu penataan dan perencanaan matang, terarah dan terpadu. Sehingga Penanggulangan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga upaya mitigasi dapat tertangani dengan baik. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimulai dari Pencegahan dan Kesiapsiagaan (*Pra*), Kedaruratan dan Logistik (*Saat*), serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi (*pasca*).

Gedung Kantor Pemerintah Kota Cimahi sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat memiliki risiko yang cukup tinggi karena posisinya hanya berjarak 5,85 Km. dari jalur sesar lembang sehingga sangat berisiko tinggi bila terjadi gempa bumi yang diakibatkan oleh sesar lembang. Bencana gempa bumi menimbulkan getaran yang dapat mengakibatkan kerusakan bangunan sehingga mengakibatkan gesekan arus listrik maupun terputus aliran listrik atau kebocoran pipa atau tabung gas sehingga menyebabkan ledakan dan menimbulkan terjadinya kebakaran.

Dalam upaya penanggulangan bencana tentunya harus didukung dengan ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun rambu-rambu evakuasi sebagai acuan atau panduan bagi semua yang berada di dalam gedung jika sewaktu-waktu terjadi bencana gempa bumi dan kebakaran dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan masyarakat serta langkah-langkah dalam upaya evakuasi mandiri dapat dipahami dalam menghadapi bencana terutama bencana gempa bumi dan kebakaran.

Sarana parasarana juga tentunya sangat menunjang dalam hal penanggulangan bencana sehingga pada saat ini akan melaksanakan kegiatan penyusunan SOP kedaruratan Kedaruratan Dan Keselamatan bencana gempa bumi dan kebakaran gedung pemerintah Kota Cimahi. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam menunjang upaya mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana melalui perencanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dalam mewujudkan tanggung jawab dan fungsi sebagai Badan Penanggulangan Bencana yang bertugas melindungi masyarakat dari segala bentuk kemungkinan bencana yang muncul.

1.3. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai sebagai hasil pekerjaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedaruratan Dan Keselamatan Gedung Pemerintah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) kedaruratan dan Keselamatan Bencana Gempa Bumi dan Kebakaran Gedung Pemerintah Kota Cimahi.
- b. Mengidentifikasi pemasangan rambu-rambu evakuasi bencana.
- c. Melaksanakan survey terhadap Gedung A, B dan C yang menjadi lokus pekerjaan.
- d. Mengkoordinasikan dengan instansi yang terkait dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).

SOP Tindak Kedaruratan Bencana di Komplek Gedung Pemerintah Kota Cimahi ini dibuat dalam rangka:

- 1) Untuk terselenggaranya perencanaan manajemen penanggulangan bencana Gempa Bumi dan Kebakaran sehingga dapat terencana dengan baik, efektif dan efisien di wilayah Komplek Gedung Kantor Pemerintah Kota Cimahi;
- 2) Sebagai acuan bagi stakeholder terkait yang berkepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana agar dapat

dilaksanakan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing;

- 3) Upaya mengurangi risiko bencana terutama dari sisi korban jiwa dari kejadian bencana di kompleks Gedung Pemerintah Kota Cimahi.

1.4. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 5) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana;

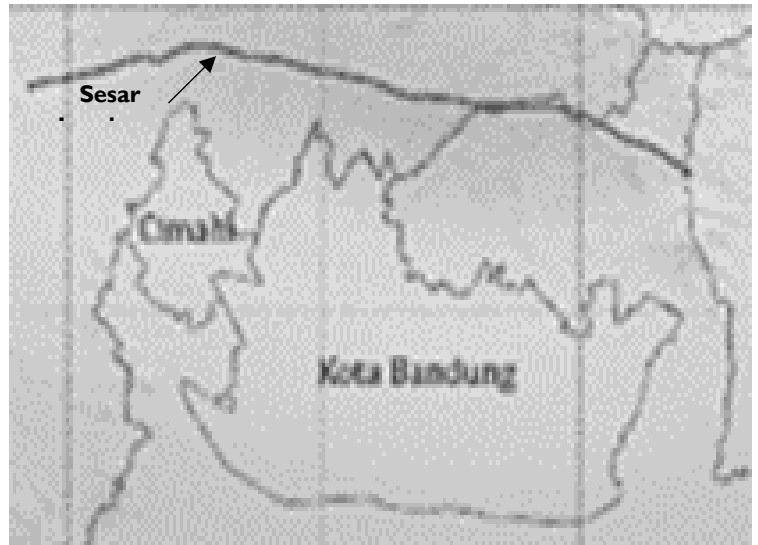
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Barat;
- 7) Peraturan Daerah Kota Cimahi Noomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi;

BAB II

KAJIAN RISIKO

2.1. KAJIAN RISIKO

Dari sisi ancaman gempa untuk Kota Cimahi, Sumber gempa bumi sekitar cekungan Kota Cimahi bersumber dari Sesar lembang dan Zona subduksi.



Berdasarkan hasil penelitian para ahli terutama yang dipaparkan oleh ahli dari PVMBG (Bpk. Imam) saat penyusunan Rencana Kontijensi Gempa Bumi Kota Cimahi pada Desember 2018 lalu menyatakan beberapa hal:

1. Untuk Sesar Lembang, yang membentang di kawasan utara dengan panjang keseluruhan 29 km, dan berpotensi menghasilkan gempa bumi dengan kekuatan M 6,5 – 7,0;
2. Kota Cimahi secara litologi (jenis batuan penyusun) terdiri dari Tufa berbatu Apung;

3. Dengan permukaan tanah Site Class: Kelas D dan C dan dihitung berdasarkan mikrozonasi yang telah dilakukan di 2 titik di Kota Cimahi memiliki Amplifikasi 2 x untuk getaran skala MMI (skala besaran getaran merusak)/kawasan dengan probabilitas Percepatan Puncak dari gempa sebesar 0,6 – 0,8 g;
4. Maka Kota Cimahi untuk ancaman Gempa masuk pada kategori Kawasan Risiko Bencana (KRB) Tinggi

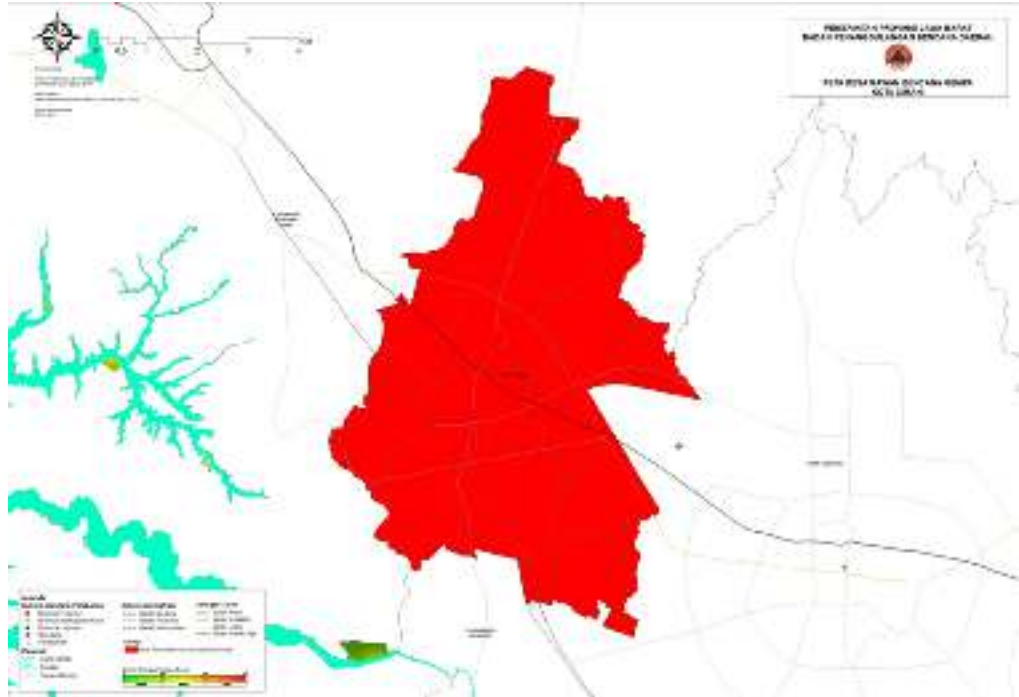
Berdasarkan hasil kajian risiko bencana (KRB) BPBD Provinsi Jawa Barat bahwa Kota Cimahi masuk kedalam zona merah/risiko bencana tinggi

Peta Bahaya Gempa Bumi Jawa Barat



Sumber data (KRB Prov. Jawa Barat)

Peta Bahaya Tinggi Gempa Bumi Kota Cimahi



Sumber data (KRB Prov. Jawa Barat)

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi melakukan analisis pengukuran jarak menggunakan aplikasi *measure map* jarak dari sesar lembang terdekat ke batas paling utara Kota Cimahi hanya berjarak sekitar 3 Km, dan jarak ke Gedung Pemerintah Kota Cimahi yaitu 5,8 Km.

Dari sisi kerentanan, secara struktur bangunan, Pemerintah Kota telah merancang dan membangun komplek gedung dengan rancangan yang cukup kuat, meski memang

diakui belum pernah dilakukan uji kekuatan bangunan untuk kondisi gempa. Yang perlu diperhatikan adalah padatnya populasi di kompleks Pemerintah Kota Cimahi ini, baik dari yang rutin berkantor maupun masyarakat yang membutuhkan layanan. Pada hasil survey ditemukan bahwa populasi rutin selain masyarakat yang berada di kompleks Pemerintah Kota Cimahi berjumlah sekitar 1.012 orang yang berada di gedung A, B dan C, dengan estimasi masyarakat yang datang terutama ke gedung C sekitar 75 – 200 orang. Maka jumlah populasi yang ada setiap harinya sekitar 1.212 orang. Ini belum menghitung yang berada di gedung/bangunan lain yang berada di sekitar kompleks Pemerintah Kota Cimahi.

Setiap lantai pada setiap gedung telah dilengkapi APAR, Hydran, Fire Alarm dan beberapa Rambu Jalur Evakuasi. Untuk rambu jalur evakuasi setidaknya telah ada satu rambu pada tangga sebelah selatan di setiap lantai. Fire alarm juga dapat difungsikan sebagai penanda untuk dilakukan evakuasi.

BAB III

KEDUDUKAN SOP DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

3.1. KEDUDUKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.

Selain PERMENPAN tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga telah menetapkan pedoman bagi Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam menyusun SOP yang tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

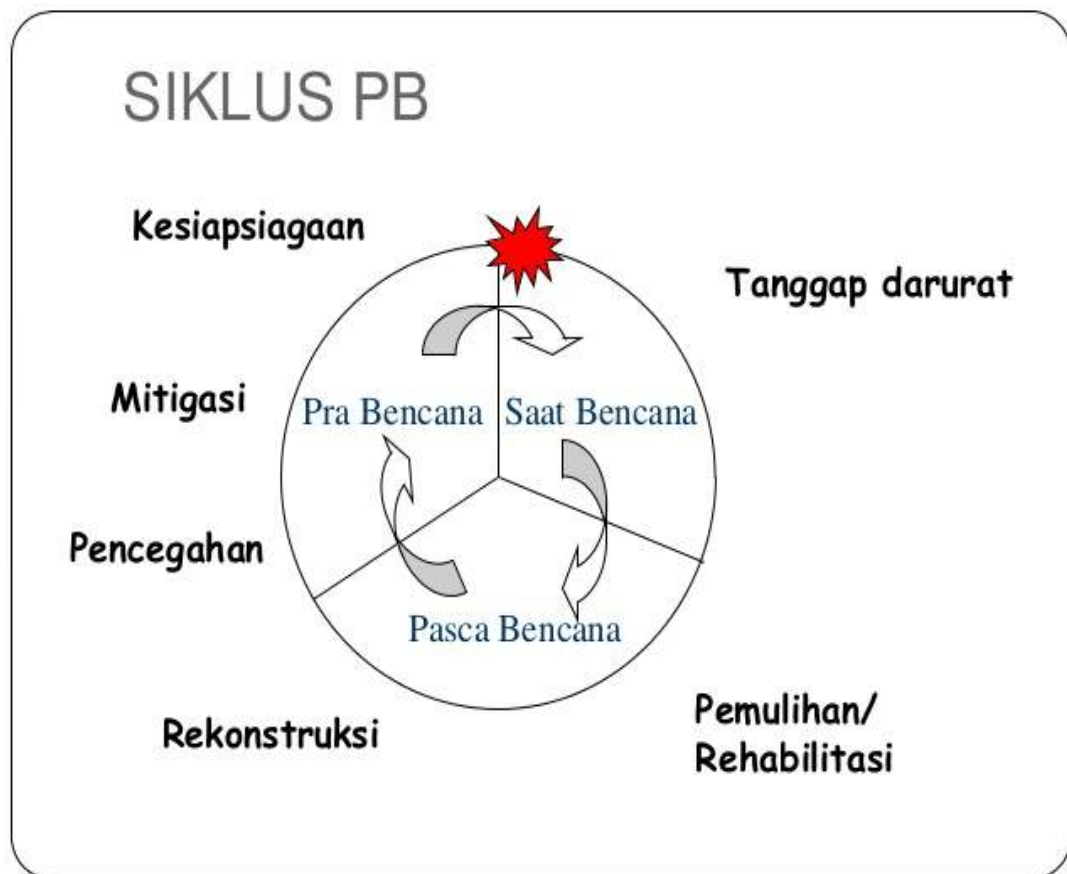
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah atau yang disingkat dengan SOP-AP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang

dijalankan oleh organisasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintah adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah. Selanjutnya SOP-AP dibagi kembali dalam SOP AP Administratif dan SOP-AP Teknis. SOP-AP administratif merupakan prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan sedangkan SOP-AP teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.

3.2. MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

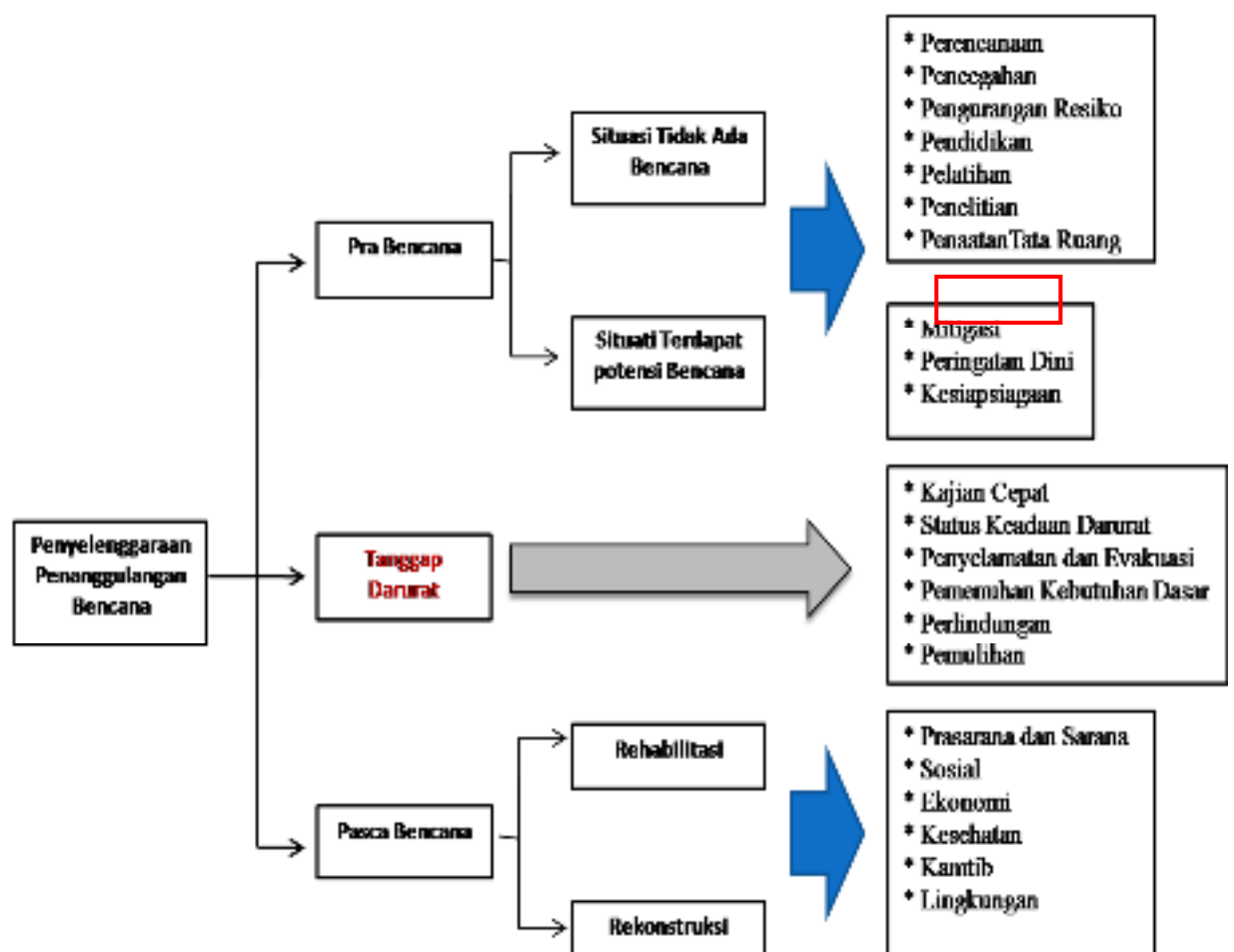
Dalam Manajemen Penanggulangan Bencana seperti yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana terdapat 3 siklus umum penanggulangan bencana yaitu Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana.



Pada pra bencana terdapat dua fase yaitu fase tidak terdapat potensi bencana yang disebut dengan Mitigasi dan fase terdapat potensi bencana yang di sebut dengan Kesiapsiagaan. Mitigasi secara umum, diartikan sebagai suatu upaya yang

dilakukan untuk mengurangi dan/ atau menghapus kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat bencana, yaitu dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya bencana.

Tujuan utama mitigasi adalah untuk mengurangi atau bahkan meniadakan risiko dan dampak bencana.



Ini yang menjadi kedudukan dari SOP Tindak Kedaruratan Bencana menjadi SOP-AP Teknis dan berupa salah satu tindakan

untuk melakukan mitigasi dalam Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.

BAB IV

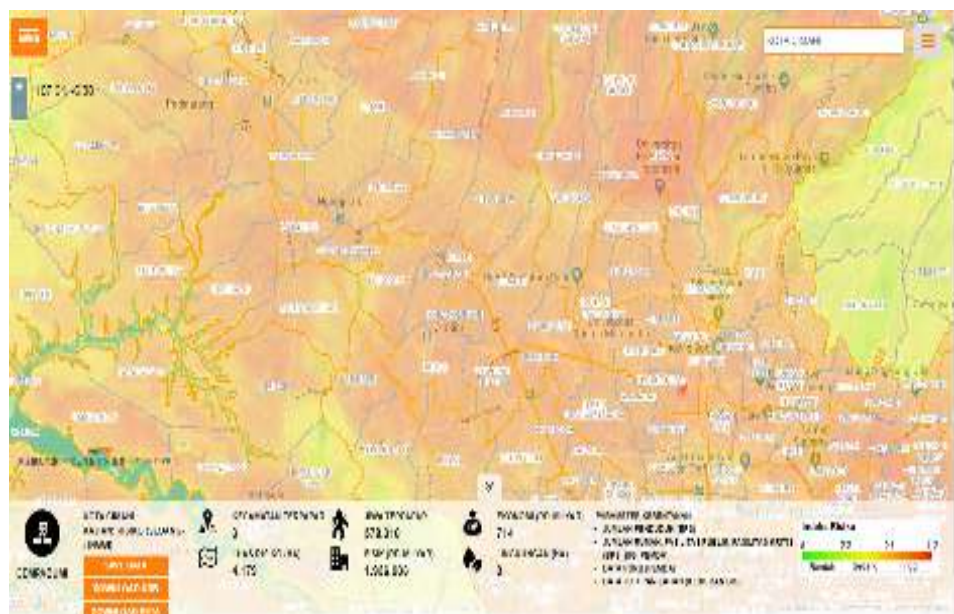
HASIL KAJIAN

Untuk membuat SOP Tindak Kedaruratan ini, dilakukan beberapa kajian yang sifatnya Desk Studi dan Survey Lapangan. Catatan penting dari Hasil Kajian ini yaitu:

4.1. Desk Studi

Dari Desk Studi didapati beberapa hal penting:

1. Tingkat Ancaman yang Sedang - Tinggi berdasarkan InaRISK untuk wilayah Kota Cimahi dalam Kegempaan. Hal ini didukung oleh pendapat para ahli dari berbagai instansi yang tergabung dalam Pusat Gempa Nasional (PUSGEN).



2. Dari studi perundangan tentang penyusunan SOP, maka SOP ini masuk pada katagori SOP-AP Teknis yang tentunya akan berhubungan dengan SOP-AP teknis lain di setiap OPD.
3. Penyusunan SOP ini dilakukan oleh BPBD Kota Cimahi sebagai leading sector, tetapi dalam pelaksanaannya akan diterapkan oleh Bag.Umum Pemkot Cimahi. Termasuk dalam penunjukan personil yang bertugas pada setiap bagian dalam SOP.

4.2. Survey Lapangan

Dari seurvey lapangan, didapat beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam penyusunan SOP ini. Yaitu :

1. Kondisi Eksisting Peralatan dan Rambu Kedaruratan di Lingkungan Pemkot Cimahi;
2. Populasi yang ada di lingkungan Pemkot Cimahi; dan
3. Kondisi lingkungan Pemkot Cimahi untuk menentukan jalur evakuasi dan titik kumpul.

4.2.1. Kondisi Eksisting Peralatan dan Rambu Kedaruratan.

Peralatan & Rambu Kedaruratan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
APAR	43	Baik	Lokasi APAR untuk standar minimal sudah memenuhi syarat jumlah. Untuk peningkatan dapat ditambah pada setiap lantai sesuai kebutuhan.
Hydran	7	Baik	Kondisi hydran cukup baik namun keberadaan slang perlu diperhatikan
Fire Alarm	8	Baik	
Springkel	-	-	Tidak terdapatnya sprinngkel
Rambu Evakuasi	7	Baik	Terdapat di setiap tangga di tiap lantai
Personil (PAMDAL)	40		Dibagi pada tiga shif untuk setiap gedung. Rasio pergedung dengan jumlah personil sebenarnya masih kurang.

Dalam rangka peningkatan, perlunya ditambah jumlah rambu evakuasi dengan memperhatikan populasi dan jalur agar tidak terjadi penumpukan. Serta penunjuk arah menuju titik kumpul.

4.2.2. Populasi.

Populasi yang dilihat bukan saja pegawai yang sehari-hari berkantor di lingkungan Pemkot tetapi juga melihat pada fasilitas yang ada yang memungkinkan adanya pengunjung. Secara umum hasil dari survey lapangan mengenai populasi ini adalah:

GEDUNG A			
Lt 1.	Kapasitas Aula ± 200 orang		
Lt 2.	± 20 orang dengan katagori VIP dan VVIP		
GEDUNG B		GEDUNG C	
Lt. 1.	35 orang	Lt. 1.	71 org
Lt. 2.	134 org	Lt. 2.	154 org
Lt 3.	125 org	Lt 3.	213 org
Lt.4	95 org	Lt.4	159 org
Aula gedung B Lt.1	Kapasitas Aula ± 100 orang	Lt. 5	6 org
		Layanan Dukcapil	75 – 200 org

Dengan demikian estimasi keseluruhan dari Gedung A, B dan C setiap hari adalah 1.212 orang dengan

jumlah pegawai 1.012 orang dan Masyarakat sekitar 200 orang.

4.2.3. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Melihat kondisi gedung A, B dan C, terutama secara struktur dan alur evakuasi, ada beberapa yang tidak direkomendasikan untuk dilalui sebagai jalur evakuasi. Yaitu:

1. Hub antar gedung. Dari Gedung A ke gedung B, hub tidak direkomendasikan untuk menjadi jalur evakuasi dari gedung B ke A maupun sebaliknya. Demikian juga dengan Hub dari gedung B ke gedung C. Juga dari pintu keluar selatan gedung B disarankan memutar menuju titik kumpul tidak melewati bawah hub.
2. Pintu keluar Timur gedung C lantai 2. Karena sifat strukturnya dengan rangka baja kampuh tempel dan tidak terlihat adanya ikatan cukup kuat.

Untuk titik evakuasi di lingkungan gedung Pemkot ditentukan ada 4 titik yaitu:

1. Halaman Gedung A : untuk yang keluar dari gedung A
2. Lapangan Apel : untuk yang keluar dari pintu utara gedung B & pintu timur gedung C

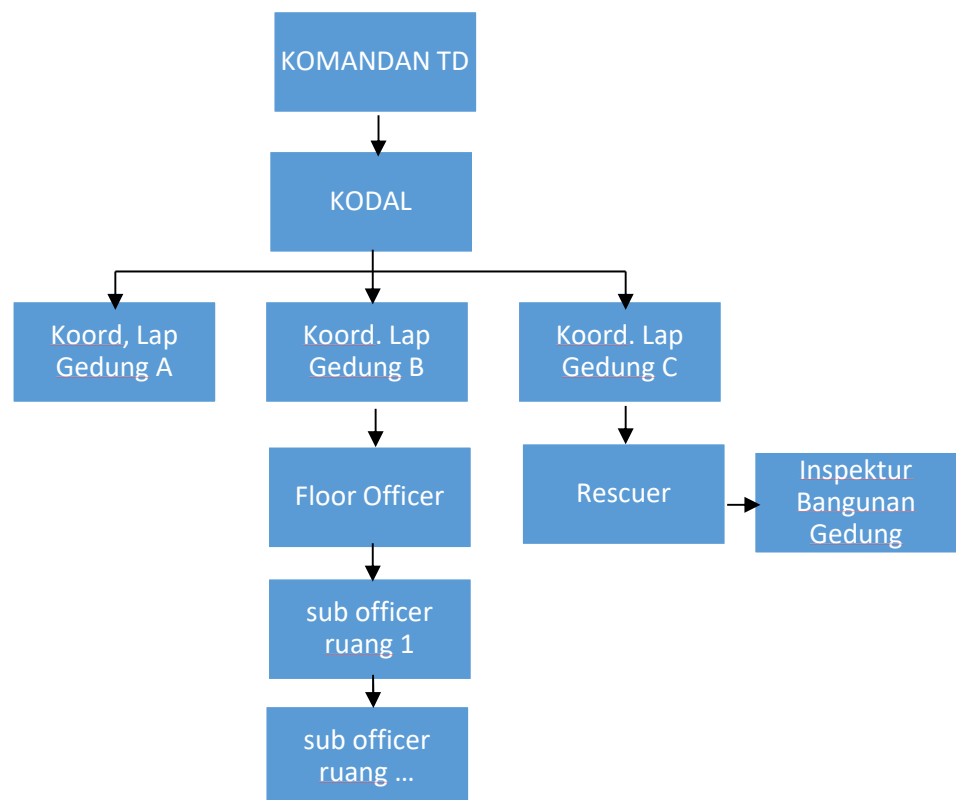
3. Lapangan Masjid : untuk yang keluar dari pintu selatan gedung B dan pintu barat gedung C dan perkantoran depan masjid.
4. Plaza Rakyat : untuk kompleks perkantoran di depan plaza rakyat.

BAB V

STRUKTUR KOMANDO TINDAK KEDARURATAN

DAN ALUR UMUM SOP

5.1. STRUKTUR KOMANDO



Pelaku/Petugas pada tindak kedaruratan ini :

1. Komandan Tanggap Darurat Kawasan : Sekda /
Bag. Umum
2. Komandan Lapangan Tindak Darurat Kawasan : Bag.
Umum / Komandan Kamdal yang bertugas

3. Komandan Pengamanan Gedung A, B, C : Komandan
Regu Kamdal tiap gedung yang bertugas
4. Floor Officer tiap lantai : Kamdal Tiap
Lantai yang bertugas
5. Sub Officer (tiap ruang/OPD) : Ditunjuk dari
tiap ruang/OPD yang bertugas
6. Rescue : Satuan Kamdal
dan dukungan luar
7. Inspektur Penilai Gedung : Personil
Dinas PUPR yang ditunjuk

5.2. ALUR UMUM SOP

Maka ketika terjadi Gempa, yang harus dilakukan bagi para aparaturnya dan masyarakat yang berada di lingkungan Gedung Pemerintah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

NO	TINDAKAN	WAKTU	PIC
1.	Tetap Tenang dan tidak panic Lakukan upaya perlindungan Lakukan upaya perlindungan diri dengan BERJONGKOK,	Ketika terjadi gempa	Setiap Pegawai

	BERTAHAN dan LINDUNGI KEPALA (<i>DUCK, HOLD and COVER</i>);		
2.	Petugas menerima informasi kejadian Gempa dari sumber terpercaya	menit ke 1 setelah gempa terjadi	Komandan Kamdal / Bag. Umum dan K3 Sumber informasi : BMKG / BPBD Kota Cimahi
3.	Petugas membunyikan Sirine/Fire Alarm	menit ke 2 setelah gempa terjadi	Komandan Kamdal / Bag. Umum dan K3
4.	Floor Officer mengarahkan evakuasi	menit ke 2 setelah gempa	Petugas Kamdal setiap gedung dan Floor Officer
5.	Melakukan Evakuasi ke titik kumpul dengan tertib dan tetap tenang dengan tidak lupa terus berdo'a	Menit ke 2 – 5 setelah gempa	Petugas Kamdal setiap gedung dan Floor Officer
6.	Berkumpul di titik kumpul	Menit ke 5 –	Petugas Kamdal

	berdasarkan satuan dinas	7 setelah gempa	setiap gedung dan Floor Officer
7.	Dilakukan penghitungan pegawai	Menit ke 7 – 10 setelah gempa	Floor officer dan sub officer
8.	Sub divisi officer melaporkan jumlah personil yang kumpul pada Floor officer (lengkap/tidak)	Menit ke 10	Floor officer dan sub officer
9.	Melakukan Penyisiran dan Penilaian kerusakan gedung	Menit ke 10 – 20 setelah gempa	Petugas Kamdal, Rescue dan Inspektur Gedung (DPUPR)
10.	Tindak Evakuasi korban (Jika ada)	Menit ke 20 – 30	Petugas Kamdal dan Rescue
11.	Melaporkan kondisi (adakah korban dan tingkat kerusakan bangunan) kepada Komando Tanggap Darurat Kawasan	Menit ke 30	Petugas Kamdal, Rescue dan Inspektur Gedung (DPUPR)

12.	Pengambilan keputusan kembali ke ruangan dan beraktifitas normal kembali atau perlu melakukan tindakan lainnya	Menit ke 30 - 40	KTD = Bag. Umum dan K3 / Sekda
13.	Jika Gedung dianggap aman dapat kembali dengan tertib ke ruangan masing-masing	Menit ke 30 - 45	Petugas Kamdal, Floor Officer, Sub officer
14.	Jika Gedung dianggap tidak aman dilakukan tindakan selanjutnya		

BAB VI

PENUTUP

Agar SOP ini berjalan dengan baik, setiap Dinas OPD diminta untuk membuat SOP Tindak kedaruratan yang didalamnya juga menunjuk Petugas-petugas untuk mendukung SOP ini. Setelah adanya SOP ini perlu ditindaklanjuti dengan pemasangan Rambu dan Uji SOP.

SOP ini dapat dijadikan acuan bahwa perlunya SOP di setiap OPD, Satuan Pendidikan dan Instansi Swasta lain dalam rangka mengurangi Risiko Bencana sesuai arahan Presiden RI pada Rakornas Bidang PB yang diselenggarakan oleh BNPB di Surabaya, Februari 2019, serta dalam rangka mewujudkan Kota Cimahi Baru, Agamis dan Berbudaya serta Tangguh dalam menghadapi bencana.

LAMPIRAN

1. Matrik SOP

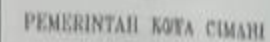
2. Denah Gedung

3. Rekap Populasi dan Rambu

SATUAN KERJA SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI 	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI NIP
Nama SOP	SOP KEDARURATAN DAN KESELAMATAN GEDUNG PEMKOT CIMAHI	
UNIT KERJA BAGIAN UMUM		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB Nomor 15 tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS-PB)	1. Bag. Umum dan Satuan Kamdal 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat komunikasi (HP, Radio, HT, Telepon) 3. Memiliki kompetensi kemampuan mengoperasikan Sirine darurat dan Paging 4. Memiliki kemampuan dalam pemetaan dan sistem informasi 5. Memiliki kemampuan teknik evakuasi dalam gedung	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP K3 PEMKOT CIMAHI 2. SOP Kedaruratan dan Keselamatan / SOP K3 setiap OPD	1. Paging 2. Sirine Darurat 3. Rambu-rambu 4. Penanda Petugas	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam tindakan kedaruratan bencana gempa bumi dan kebakaran di kompleks gedung pemerintahan kota cimahi Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan upaya tindak kedaruratan bencana tidak akan terlaksana secara cepat, tepat dan maksimal.	SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Sekretaris Daerah diteruskan kepada Bag. Umum untuk pelaksanaannya	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TINDAK KEDARURATAN DAN KESELAMATAN DI GEDUNG PEMERINTAH KOTA CIMAHI

NO	KEGIATAN	KAMDAL	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			KETERANGAN
			KOMANDAN KTD	SEKRETARIS DAERAH	INSTANSI TERKAIT	BAGIAN UMUM		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Laporan kejadian bencana dan usulan penetapan status tanggap darurat bencana;							Laporan	1 Jam	Laporan Kejadian bencana dan usulan	
2	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan rekomendasi status tanggap darurat bencana;							Laporan Kejadian bencana dan usulan	1 Jam	Pertimbangan teknis terkait atas status tanggap darurat bencana	
3	Usulan penetapan status tanggap darurat bencana;							Laporan Kejadian bencana dan usulan Pertimbangan teknis terkait atas status tanggap darurat bencana	30 menit	Disposisi Sekda	
4	Membuat rancangan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;							Disposisi Sekda	1 Jam	Draf SK penetapan status tanggap darurat bencana	
5	Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana;							Draf SK penetapan status tanggap darurat bencana	30 menit	SK Walikota penetapan status tanggap darurat bencana	
6	Menyampaikan SK Walikota tentang Tanggap Darurat							SK Walikota penetapan status tanggap darurat bencana	30 menit	Tanda terima SK	
7	Mengumumkan status tanggap darurat bencana							SK Walikota penetapan status tanggap darurat bencana	30 menit	Informasi	Diumumkan melalui media massa
8	Mendokumentasikan SK status tanggap darurat bencana							SK Walikota penetapan status tanggap darurat bencana	5 menit	Arsip File	



FAJARAGUNG DUMIASRI
Jl. Raya No. 100
Telp. (021) 25111111
Fax (021) 25111111
E-mail: fajaragung@indosat.net.id

Kommunikation, Analyse, Struktur, W & F



P.T. PERENTJANA DJAJA

1. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1000-1001.
 2. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1001-1002.
 3. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1002-1003.
 4. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1003-1004.
 5. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1004-1005.

relative

SHOP DRAWING

[illegible]

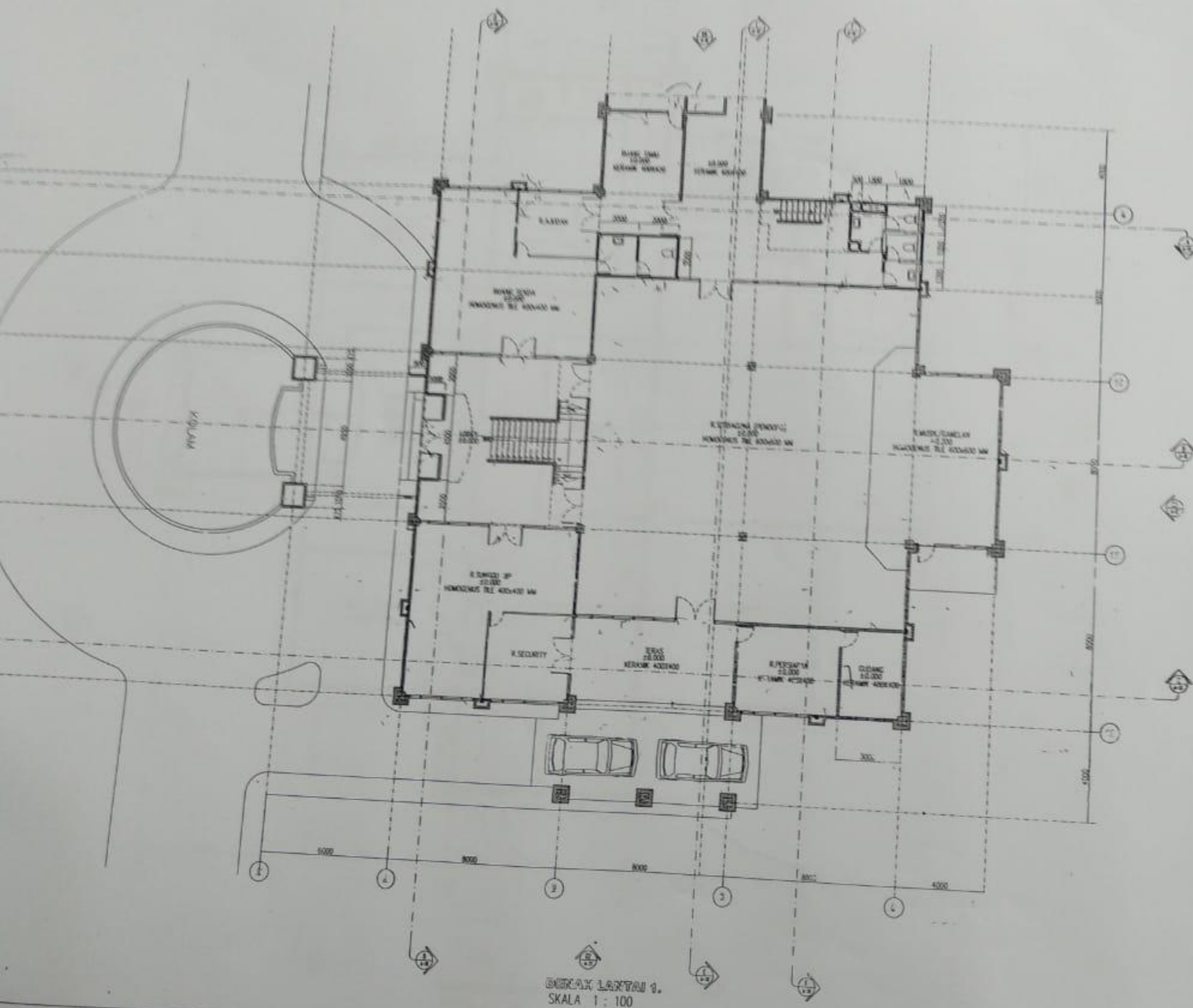
Name: _____

PENGEMBANGAN KAPASITAS
PUSAT PEMERINTAH KOTA CIMAHI

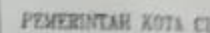
Author's address:

DENAH LANTAI 1
GEDUNG A

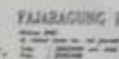
Examination	No. Pages
Examinee Nyon	No. Senses
Examinee	No. Title
Examinee	State
Examinee JULY 2004	Art. License



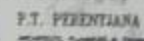
DEKAT LANTAI 1.
SKALA 1 : 100



09/08/2004



Computer Architecture, 3rd ed., W. H. B.



Carroll, J.

SHOP DRAW

[illegible]

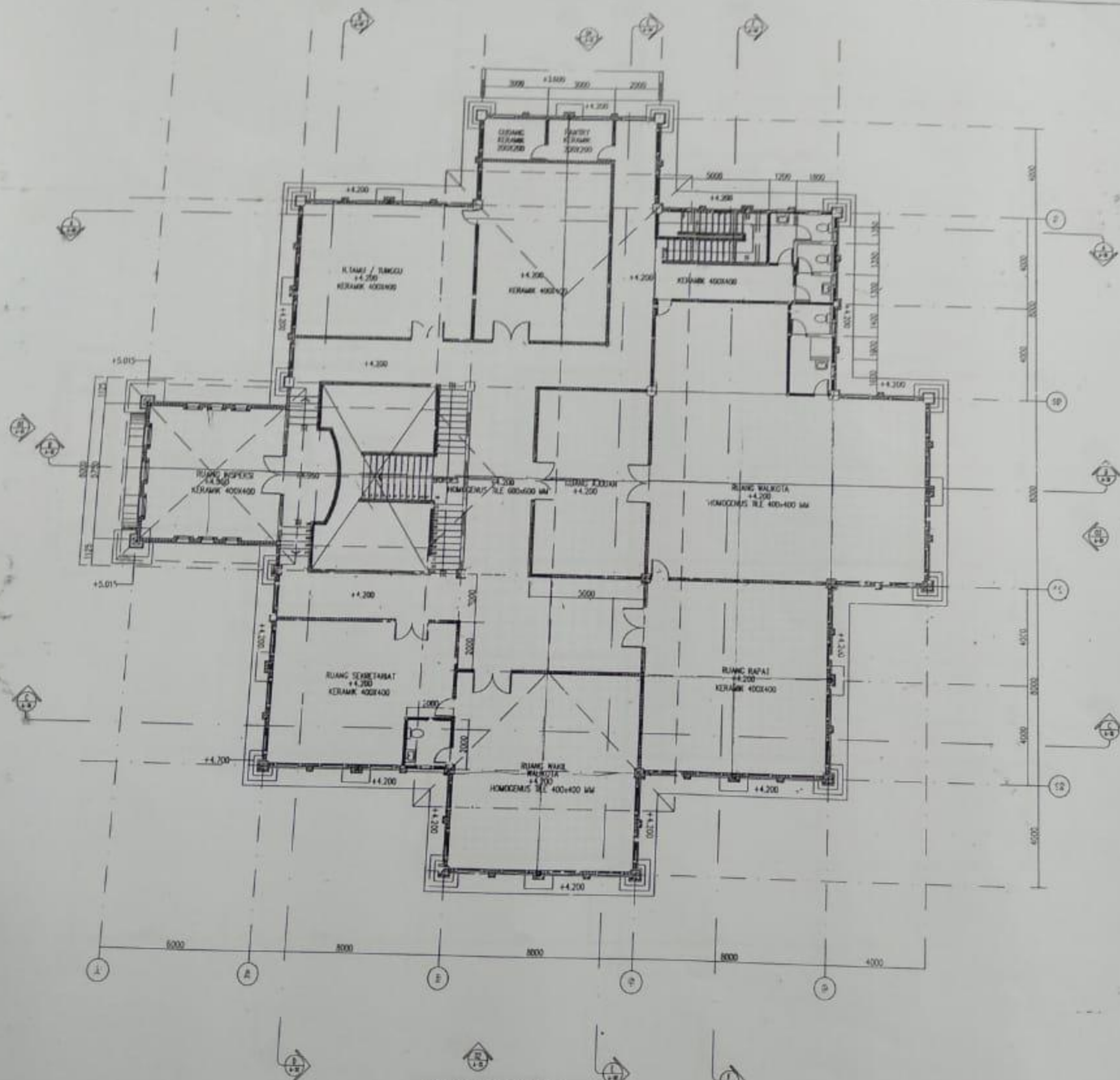
Normal Proyección:

PENGEMBANGAN KAPASITAS
PUSAT PEMERINTAH

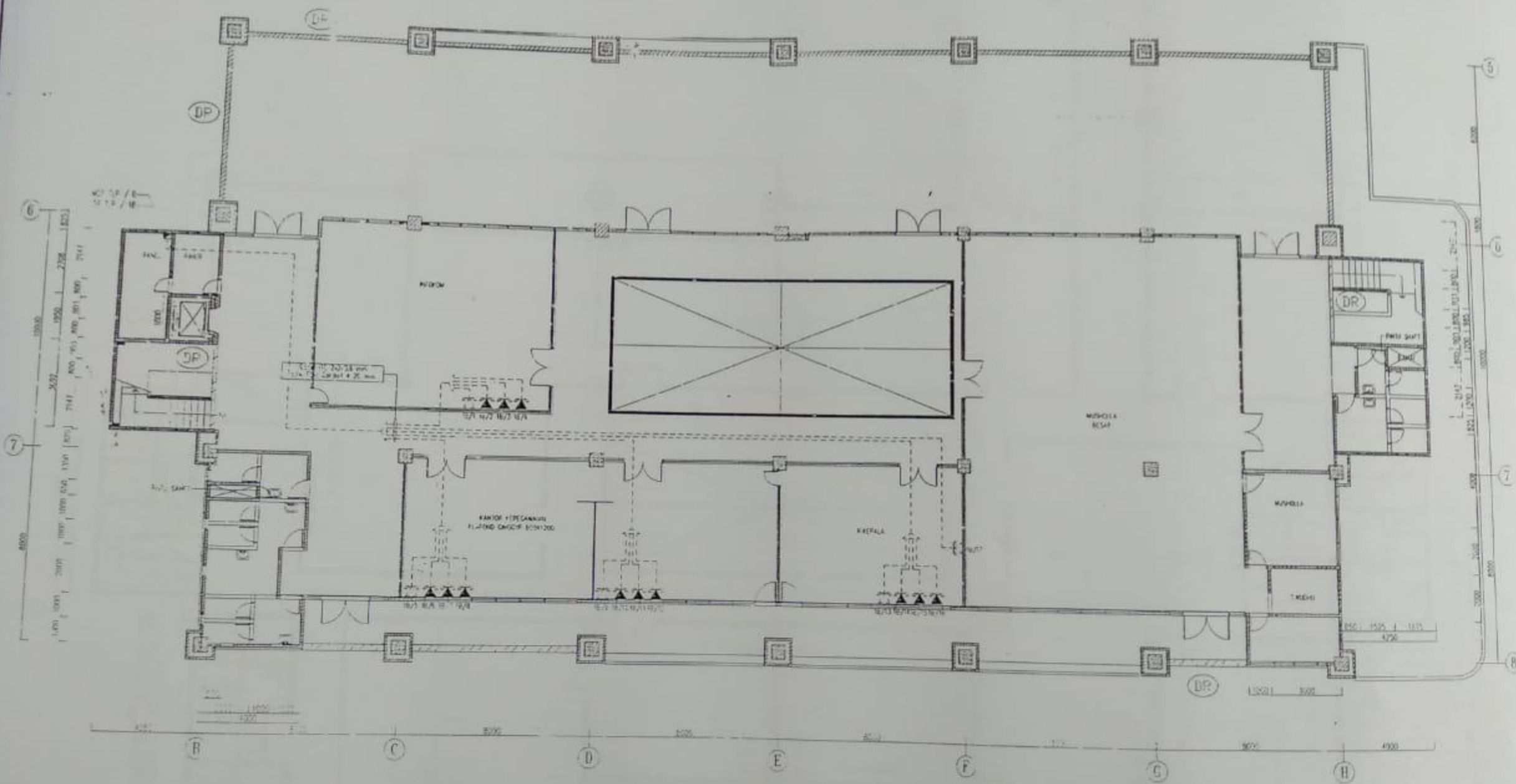
Left Column:

DENAH LAJ
GEDUNG

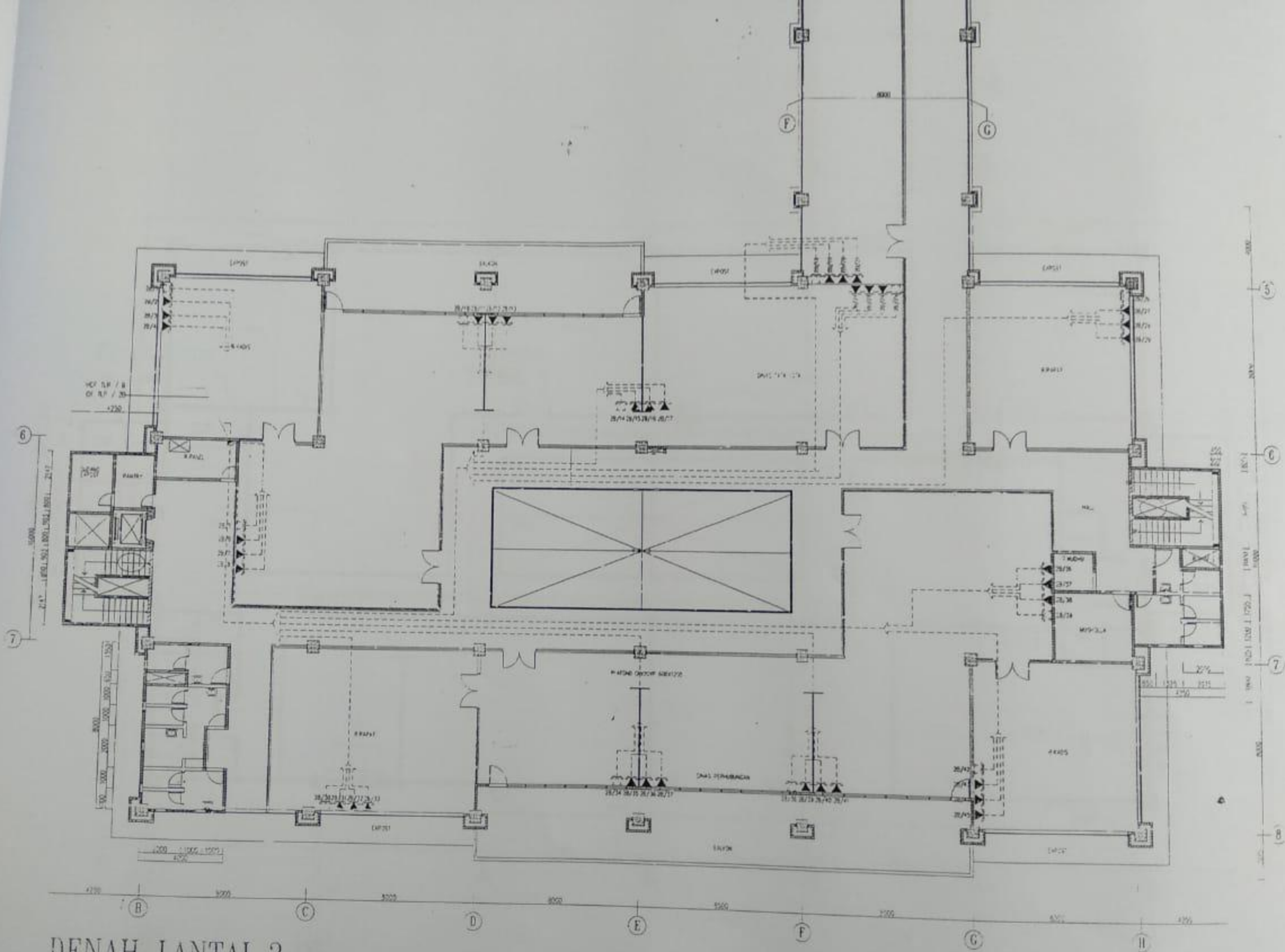
DATE	
NAME	Nylon
DATE	
NAME	
DATE	JULY 2004



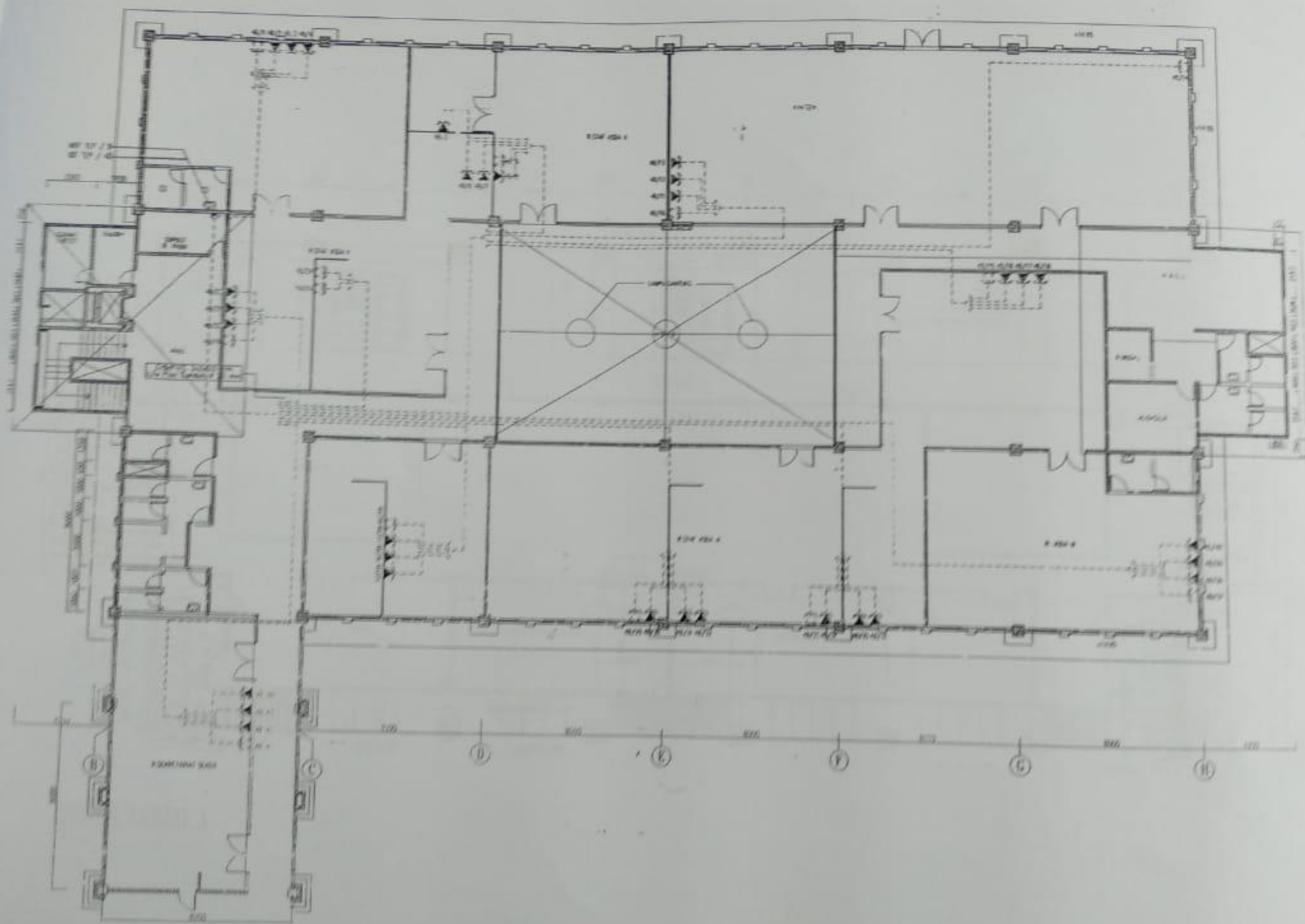
DENAH LANTAI 2.
SKALA 1 : 100



DENAH LANTAI 1
BANGUNAN E



DENAH LANTAI 2
BANGUNAN B



DENAH LANTAI 1
BANGUNAN B

5
4
3
2
1



PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

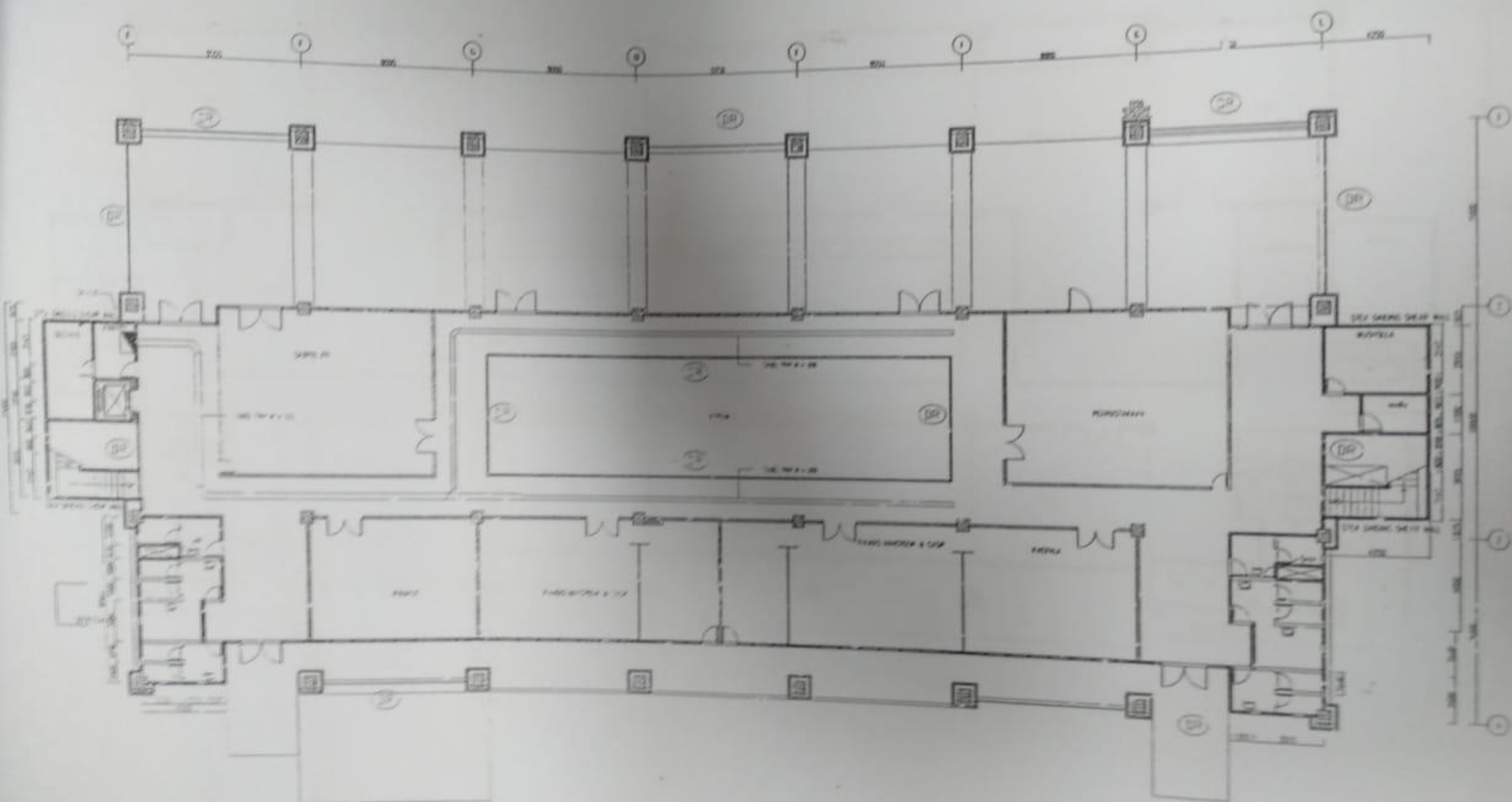
PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

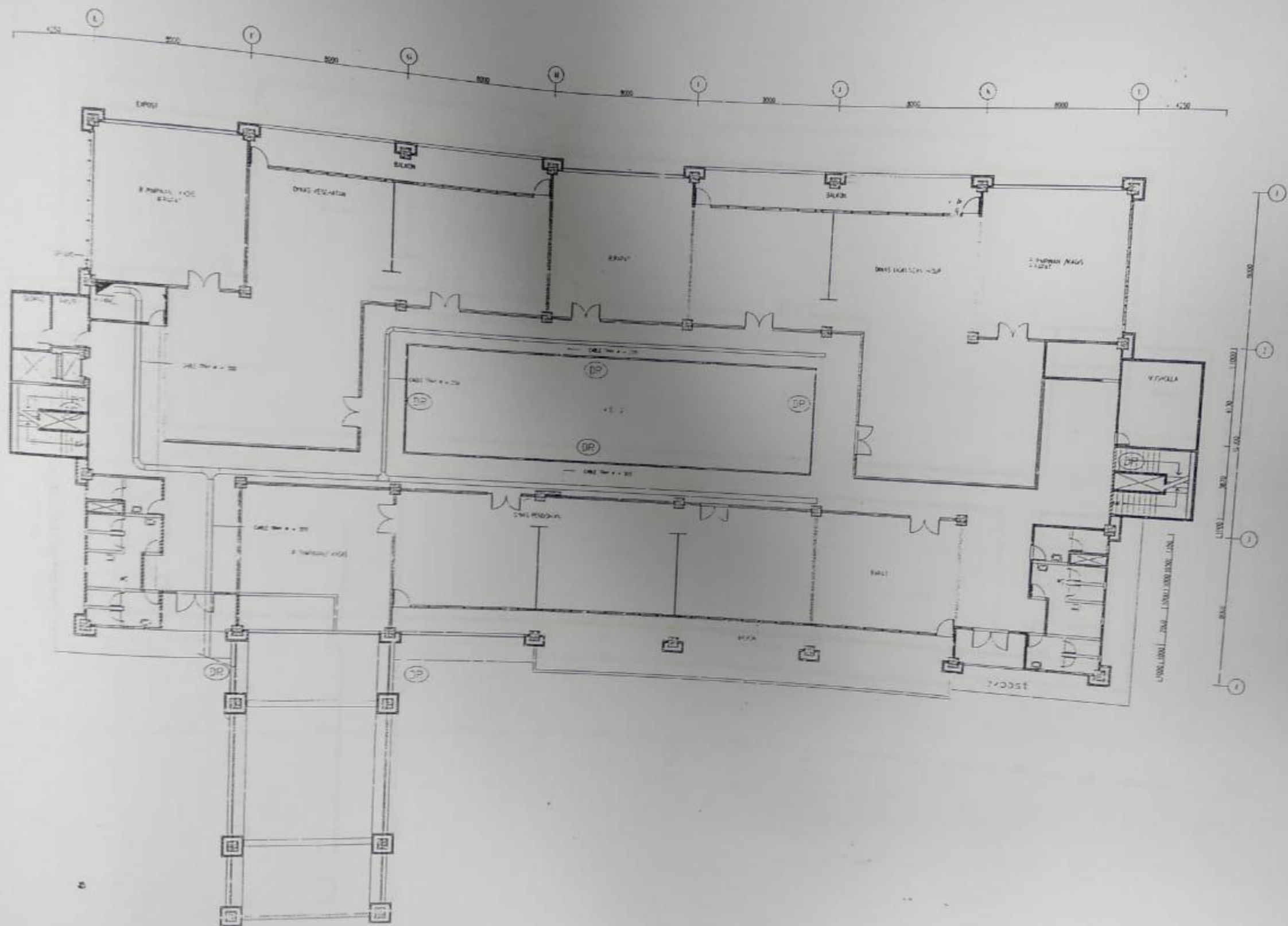
PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

PEMERINTAH KOTA CIMAH

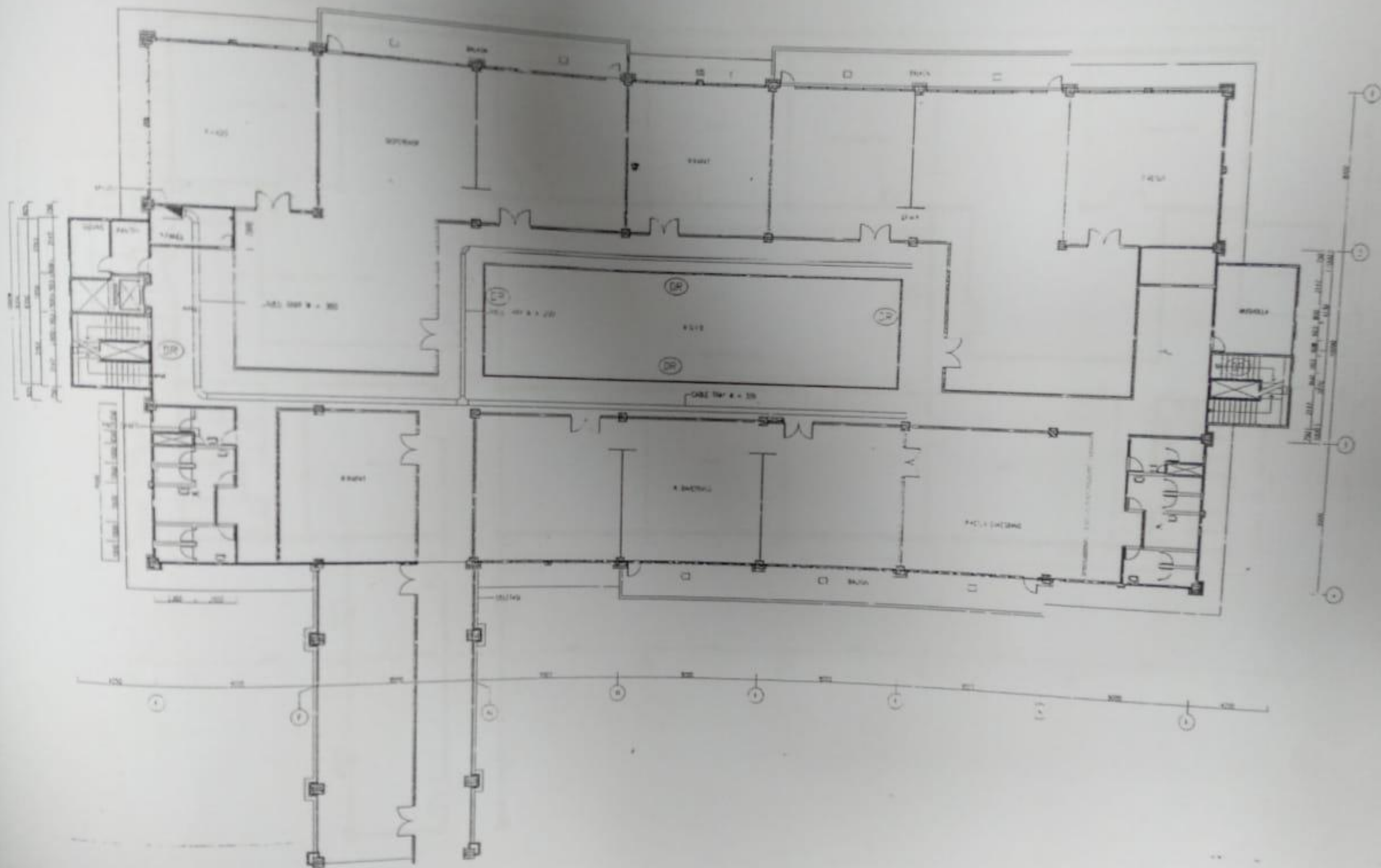


DENAH LANTAI 1

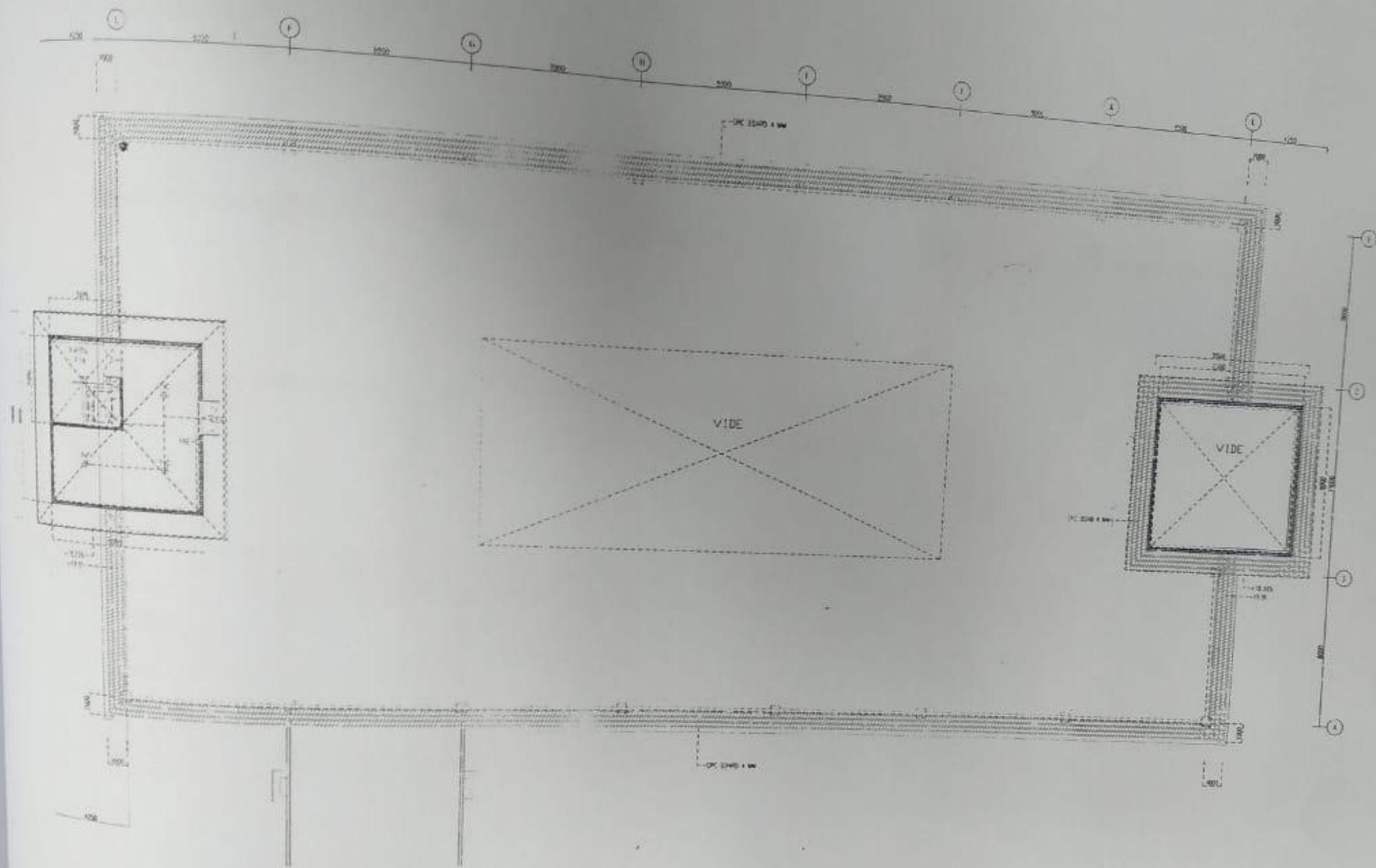


DENAH LANTAI 2

BANGUNAN C



DENAH LANTAI 3
BANGUNAN C



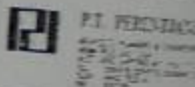
DENAH LANTAI ATAP
BANGUNAN C



PEMERINTAH KOTA



PT. PERINTAJANA DIJAJA



PT. FARAGUNG BUMIHATI

ASBUILT DRAWING
PENGEMBANGAN KAWASAN
PUSAT PEMERINTAH KOTA CI

LAY-OUT INSTALASI LAMPU LANTAI
(GEDUNG C)

PIMPINAN PELAKSANA
P.T. PERINTAJANA DIJAJA

PT. FARAGUNG BUMIHATI

PT. FARAGUNG BUMIHATI

PT. FARAGUNG BUMIHATI

PT. FARAGUNG BUMIHATI

PT. FARAGUNG BUMIHATI

PT. FARAGUNG BUMIHATI

PT. FARAGUNG BUMIHATI

PT. FARAGUNG BUMIHATI

REKAP HASIL SURVEY
POPULASI GEDUNG A, B DAN C KANTOR PEMERINTAH KOTA CIMAHI
PERIODE SURVEY : FEBRUARI 2019

GEDUNG A		
Lt	OPD	Populasi Rutin
1	BPPD	14
1	Disdukcapil	57
1	Layanan Disdukcapil & Perijinan	75
2	PUPR	57
2	BPPD	62
2	Disnaker	35
3	Dinsos	61
3	Dinkes	85
3	Bag. Umum & Protokol	17
3	Dinkopdagin	50
4	Kimrum	34
4	LH	50
4	Dishub	25
4	Bag. Organisasi	10
4	Sekretariat UKS	2
4	BKPSDMD	38
5	Kimrum	6
Jumlah		678

GEDUNG B		
Lt	OPD	Populasi Rutin
1	Unit Layanan Pengadaan	2
1	Sub Bag. TU & Kepegawaian	12
1	Sekre PPID	21
2	Bag. Umum & Protokol	11
2	Dinas Kebudayaan & Olahraga	32
2	PKK	5
2	Dinas Pendidikan	86
3	Diskominfoarpus	13
3	Kesbang	16
3	Bappeda	57
3	Kersa	11
3	Bag. Hukum	15
3	Bag. Pemerintahan	13
4	Bag. Pengadaan barang & Jasa	18
4	Sub Bag Keuangan	11
4	Kantin	14
4	Sekda	5
4	...?....	47
Jumlah		389

GEDUNG C		
Lt	OPD	Populasi Rutin
2	ajudan	5
2	staf khusus	8
2	sekda	5
2	wali dan wakil	2
1	Aula Gedung A	125
Jumlah		145

Gedung A	678
Gedung B	389
Gedung C	145
Total	1.212

**REKAP HASIL SURVEY EKSISTING RAMBU DAN SARANA PEMADAM
GEDUNG A, B DAN C KANTOR PEMERINTAH KOTA CIMAHI
PERIODE SURVEY : FEBRUARI 2019**

Gedung	Lt	APAR	Hidrant	Rambu Jalur Evakuasi	Keterangan
C	1	2	0	0	
C	2	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
C	3	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
C	4	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
C	5	0	0	0	
B	1	2	0	1	satu rambu di jalur kanan
B	2	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
B	3	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
B	4	8	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
A	2	2	1	0	
Jumlah		44	7	7	

REKAP HASIL SURVEY
POPULASI GEDUNG A, B DAN C KANTOR PEMERINTAH KOTA CIMAHI
PERIODE SURVEY : FEBRUARI 2019

GEDUNG A		
Lt	OPD	Populasi Rutin
1	BPPD	14
1	Disdukcapil	57
1	Layanan Disdukcapil & Perijinan	75
2	PUPR	57
2	BPPD	62
2	Disnaker	35
3	Dinsos	61
3	Dinkes	85
3	Bag. Umum & Protokol	17
3	Dinkopdagin	50
4	Kimrum	34
4	LH	50
4	Dishub	25
4	Bag. Organisasi	10
4	Sekretariat UKS	2
4	BKPSDMD	38
5	Kimrum	6
Jumlah		678

GEDUNG B		
Lt	OPD	Populasi Rutin
1	Unit Layanan Pengadaan	2
1	Sub Bag. TU & Kepegawaian	12
1	Sekre PPID	21
2	Bag. Umum & Protokol	11
2	Dinas Kebudayaan & Olahraga	32
2	PKK	5
2	Dinas Pendidikan	86
3	Diskominfoarpus	13
3	Kesbang	16
3	Bappeda	57
3	Kersa	11
3	Bag. Hukum	15
3	Bag. Pemerintahan	13
4	Bag. Pengadaan barang & Jasa	18
4	Sub Bag Keuangan	11
4	Kantin	14
4	Sekda	5
4	...?....	47
Jumlah		389

GEDUNG C		
Lt	OPD	Populasi Rutin
2	ajudan	5
2	staf khusus	8
2	sekda	5
2	wali dan wakil	2
1	Aula Gedung A	125
Jumlah		145

Gedung A	678
Gedung B	389
Gedung C	145
Total	1.212

**REKAP HASIL SURVEY EKSISTING RAMBU DAN SARANA PEMADAM
GEDUNG A, B DAN C KANTOR PEMERINTAH KOTA CIMAHI
PERIODE SURVEY : FEBRUARI 2019**

Gedung	Lt	APAR	Hidrant	Rambu Jalur Evakuasi	Keterangan
C	1	2	0	0	
C	2	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
C	3	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
C	4	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
C	5	0	0	0	
B	1	2	0	1	satu rambu di jalur kanan
B	2	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
B	3	6	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
B	4	8	1	1	rambu di jalur tangga selatan sedangkan utara tdk ada.
A	2	2	1	0	
Jumlah		44	7	7	

REKAP HASIL SURVEY KEBUTUHAN RAMBUJALUR EVAKUASI
GEDUNG A, B DAN C KANTOR PEMERINTAH KOTA CIMAHI
PERIODE SURVEY : FEBRUARI 2019

Rambu Jalur Evakuasi dalam Gedung

Gedung	Lt	Kanan	Kiri	Tangga
C	1	4	2	
C	2	5	4	1
C	3	6	5	1
C	4	5	4	1
C	5			1
B	1	4	1	
B	2	4	4	1
B	3	6	4	1
B	4	8	5	1
A	1	1		
A	2	1	1	
		44	29	7

Rambu Titik Kumpul (Luar Gedung)

1. Lapangan apel/upacara
2. Depan Masjid
3. Plaza Rakyat
4. Halaman Gedung A

Rambu Menuju Titik Kumpul (Luar Gedung)

1. Tampak Parkir depan Layanan Gedung C ke arah depan Masjid
2. Depan Gedung B ke arah Lap. Apel
3. Depan Gedung C ke arah Lap. Apel

